

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Membangun desa sama artinya membangun sebagian besar penduduk Indonesia.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dewasa ini tuntutan akuntabilitas tidak hanya pada pemerintah pusat maupun daerah saja, tetapi pemerintah desa juga memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Sejak disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa atau yang sering disebut dengan undang-undang desa, pembangunan Negara difokuskan pada pembangunan kesejahteraan desa. Selain tuntutan akuntabilitas, kepala desa

juga harus mampu mengimplementasikan segala kegiatan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa. Sehingga berdasarkan wewenang tersebut desa merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit sebagai miniatur suatu Negara, akan tetapi dalam melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa masih mengalami kendala, khususnya dalam hal keuangan seperti sumber pendapatan desa yang rendah, baik dari pendapatan asli desa maupun dari bantuan pemerintah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 212 menyebutkan ayat (1) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Ayat (2) menyatakan bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian pengertian pengelolaan keuangan desa sebagaimana disebut dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan tentang APBDes
2. Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan Keuangan Desa
3. Menetapkan Bendahara Desa
4. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
5. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Partisipatif yaitu setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di desa.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu anggaran harus dilakukan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya otonomi desa, maka desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. APBDes pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama Badan Permusyawaratan Desa yang dituangkan ke dalam peraturan desa. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, APBDes terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa,
- b. Belanja Desa, dan
- c. Pembiayaan Desa

Keuangan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sumber-sumber pendapatan desa yang bersumber penyerahan urusan kewenangan kabupaten kepada pemerintah desa.

Pengelolaan keuangan desa bisa sangat sensitif di kalangan masyarakat, maka dari itu diperlukan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa agar tidak terjadi tudingan buruk terhadap aparatur desa. Sehingga masyarakat mengetahui pengelolaan dan penggunaan keuangan desa pertahun. Seiring dengan menguatnya akuntabilitas, maka akan meningkat pula transparansi informasi kepada masyarakat luas sebagai pemenuhan hak publik.

Dari hal tersebut untuk mengetahui kesesuaian akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Gagaksipat dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, maka penulis tertarik membahas dan menganalisis dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 (STUDI KASUS DI DESA GAGAKSIPAT KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dikaji dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawabannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dikaji dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada banyak pihak, diantara lain :

1. Bagi Pemerintah Desa Gagaksipat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi untuk meningkatkan tata kelola Desa Gagaksipat agar menjadi lebih baik.
2. Bagi peneliti, digunakan untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang didapat dalam hal akuntansi sektor publik khususnya pengelolaan keuangan yaitu salah satunya pengelolaan Keuangan Desa.
3. Bagi masyarakat sekitar, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menilai dan mengetahui bagaimana hasil pengelolaan keuangan di Desa Gagaksipat.

4. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan tambahan informasi untuk penelitian berikutnya khususnya mengenai pengelolaan keuangan di Desa Gagaksipat.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang secara ringkas menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti dan kerangka teori.

Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian tentang penjelasan secara rinci mengenai semua unsur metode dalam penelitian ini, yaitu subyek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian tentang gambaran umum Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngempak, Kabupaten Boyolali,

gambaran umum lokasi penelitian, hasil analisis data dan inteprestasi hasil penelitian.

Bab V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, serta berisi saran-saran yang perlu disampaikan baik untuk obyek peneliti maupun bagi peneliti yang selanjutnya.